

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Otoritas berupaya untuk memotivasi pertumbuhan ekonomi kecil, salah satunya dengan memprioritaskan pada pembinaan dan perlindungan usaha kecil menengah dan keuangan berpendapatan rendah, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan dalam kurun waktu tertentu dapat mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini sangat penting bagi setiap pelaku usaha, termasuk peningkatan pendapatan, dan dengan adanya peningkatan pendapatan, maka dapat dikatakan bahwa Perusahaan atau usaha tersebut mengalami kemajuan yang signifikan (SE & Anggraeni, 2019).

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah bentuk usaha produktif yang dikelola oleh individu atau badan usaha dengan karakteristik seperti jumlah tenaga kerja yang kecil, skala operasional terbatas, serta penghasilan yang relatif rendah, dan biasanya dimulai dengan modal yang minim. Peran UMKM sangat krusial bagi perkembangan ekonomi sebuah negara. Ini terlihat dari kontribusi UMKM dalam menyediakan lapangan kerja, banyaknya jumlah unit usaha, dan sumbangannya terhadap peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) di tingkat nasional, UMKM menjadi salah satu sektor utama yang mendukung stabilitas ekonomi nasional. Meskipun demikian, tantangan prioritas yang diatasi oleh UMKM kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan yang memadai. Kredit Usaha Rakyat (KUR) hadir sebagai solusi pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. PT Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai salah satu bank yang



ditunjuk untuk menyalurkan KUR, memiliki peran penting dalam menilai kelayakan pembiayaan tersebut (Hartato, 2021).

Analisis pinjaman ini merupakan proses awal alokasi modal yang dilakukan oleh bank. Keberhasilan dalam menganalisis pengajuan pinjaman calon nasabah akan berdampak positif terhadap kelancaran pembayaran angsuran, sedangkan kegagalan dalam pemrosesan pinjaman akan berdampak pada risiko kemacetan pembayaran angsuran calon nasabah. Kemacetan pinjaman ini akan membutuhkan banyak tenaga dalam pemrosesannya. Pada kelayakan pembiayaan ini, pegawai kantor harus mengetahui terlebih dahulu usaha nasabah yang ingin diberikan pembiayaan kredit apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak.

Studi Kasus kantor PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Mattoangin yang dimana pegawai kantor turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan usaha nasabah yang ingin melakukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimana usaha nasabah tersebut yaitu usaha ikan kering dan alasan nasabah tersebut ingin melakukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikarenakan nasabah ingin melakukan penambahan modal dari 1 dos ikan kering menjadi 5 dos ikan kering. Akan tetapi, pegawai kantor bertanya kepada nasabah tersebut, kendaraan apa yang digunakan untuk mengangkut ikan kering tersebut?" Ujar pegawai kantor, dan nasabah tersebut menjawab, "saya menggunakan kendaraan motor untuk mengangkut ikan kering sebanyak 50 dos ikan kering". Pegawai kantor tersebut terdiam setelah mendengarkan perkataan nasabah. Setelah itu, pegawai kantor PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Mattoangin telah melakukan pengecekan usaha nasabah tersebut. Pegawai kantor kembali ke kantor untuk memverifikasi apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. Setelah pegawai kantor PT. Bank Negara Indonesia telah melakukan verifikasi dan pengecekan di kantor, ternyata nasabah tersebut tidak layak untuk diberikan pembiayaan Kredit



Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, analisis proses dan pengajuan pinjaman harus dilakukan secara cermat. Berdasarkan hasil penelitian mencari tau kelayakan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City oleh Anya (Kurniadi, 2017), alur pemberian Kredit Usaha Rakyat dikerjakan melalui beberapa langkah pinjaman antara lain tahap pengajuan pinjaman, tahap analisis pinjaman, tahap pengambilan keputusan pinjaman, tahap pencairan/akad pinjaman, dan tahap monitoring atau pemantauan pinjaman.

Penelitian ini mengacu pada teori studi kelayakan bisnis dan teori pelaksanaan prinsip 5C Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut (Kasmir & Jakfar, 2003) studi kelayakan bisnis adalah proses yang menganalisis secara mendalam mengenai suatu usaha yang akan dijalankan, untuk menilai apakah usaha tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak. Menurut (Dandewijaya, 2005) menjelaskan bahwa prinsip 5C sebagai panduan dalam analisis kelayakan kredit. Namun, prinsip ini bukan hanya terbatas pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), melainkan diterapkan secara umum pada berbagai jenis kredit. Prinsip 5C adalah metode analisis yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan pemberian kredit, termasuk dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penting untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran dan dapat meningkatkan kapasitas usaha penerima kredit. Proses analisis kelayakan juga berfungsi untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam evaluasi kelayakan pembiayaan KUR di Bank Negara Indonesia. Analisis pinjaman yang berhasil ditujukan kepada bank yang perlu mengetahui apakah pengajuan pinjaman calon nasabah layak untuk mendapatkan pinjaman. Untuk menentukan apakah pinjaman yang ditawarkan layak,



Bank Negara Indonesia Cabang Mat Angin menggunakan prinsip 5C saat menganalisis pengajuan pinjaman. Prinsip 5C adalah prinsip yang diterapkan dengan memantau apakah debitur layak menerima pinjaman sebelum menawarkan pinjaman kepada mereka.

Berdasarkan penelitian dari Hauriatul (Jannah, 2019) Analisis kelayakan kredit Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR) iB melalui proses kajian dan analisis kelayakan kredit dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian dana. Dalam rangka meminimalisir risiko, PT. BRI Syariah menerapkan evaluasi kapasitas Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR) iB berdasarkan prinsip 5C dengan menilai karakter, kapasitas (kemampuan membayar), agunan, permodalan, dan situasi ekonomi. Berdasarkan praktiknya, PT. BRI Syariah mengutamakan tiga aspek sebagai aspek pendukung namun penting untuk dinilai, yaitu karakter, kapasitas, dan situasi ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian dari Elsa Yan (Fransisca, 2020) Pelaksanaan prinsip 5C analisis kelayakan pembiayaan KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar, Penerapan prinsip 5C dalam analisis kelayakan mengikuti pandangan yang dikembangkan oleh para ahli, namun tidak semuanya diterapkan secara cermat. Prinsip-prinsip tersebut terlaksana dengan baik karena tiga prinsip karakter, kapasitas, dan agunan menjadi inti, namun prinsip permodalan dan kondisi ekonomi belum dimanfaatkan secara maksimal karena hanya digunakan sebagai faktor pembantu dalam melakukan analisis kelayakan. Hasil yang diperoleh dari analisis kelayakan 5C pinjaman KUR di BRI Syariah KCP Blitar adalah peningkatan NOA (jumlah rekening) yaitu peningkatan jumlah nasabah, perbaikan kualitas kinerja bank, dan minimalisasi kerugian akibat kredit macet.

Perbedaan hasil penelitian berdasarkan pemberian pembiayaan menurut penelitian dari Anya Kurniadi Putri (2017), menjelaskan bahwa proses pemberian pembiayaan KUR di BRI Syariah terdiri dari lima tahapan: pengajuan, analisis,



keputusan, pencairan/akad, dan monitoring, sedangkan menurut Hauriatul Jannah (2019), menekankan proses musyawarah dalam analisis kelayakan dan mengacu pada tingkat kolektibilitas pembiayaan dan juga lebih mengutamakan Tiga dimensi, yaitu kepribadian, kemampuan dan situasi ekonomi, digunakan sebagai kriteria evaluasi, sedangkan dimensi lainnya hanya digunakan sebagai dimensi pendukung, dan menurut Elsa Yan Fransisca (2020), berfokus pada penerapan prinsip 5C sebagai pedoman utama, meskipun ada ketidaksempurnaan dalam implementasinya.

Tidak seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada menyempurnakan beberapa hal yang masih kurang diperhatikan seperti dalam menerapkan prinsip 5C yang dimana pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan 3C dan yang lainnya hanya sebagai pendukung, serta penelitian ini memberikan studi kasus yang terjadi pada UMKM seperti UMKM Kopi Rasa Kopi yang dimana keberhasilan UMKM tersebut mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Mattoangin dan dalam halnya pada proses pembiayaan, selain pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahapan nasional, perlu juga diperhatikan dengan melihat pada pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kebijakan institusi dan juga sering mengintegrasikan pendekatan digital, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses verifikasi. Selain pada proses pembiayaan, ada juga yang perlu diperhatikan, yaitu pendekatan analisis kelayakan yang dimana pendekatannya sering kali melibatkan sistem scoring berbasis teknologi dan integrasi dengan data eksternal (seperti laporan SLIK OJK) untuk menilai kolektibilitas dan risiko nasabah.

lain itu juga, lebih menekankan pada kemampuan pembayaran (*capacity*) dan nilai jaminan (*collateral*), seiring dengan penerapan kebijakan berbasis data dan teknologi dengan tujuan cenderung lebih fokus pada optimalisasi volume pembiayaan dan



meningkatkan inklusi keuangan, termasuk memperluas jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor mikro melalui layanan digital. Dengan menggunakan sistem berbasis teknologi untuk monitoring, seperti aplikasi khusus untuk pelaporan kredit macet dan analisis data *real-time*.

Analisis kelayakan dalam produk pembiayaan umumnya dilakukan Mengevaluasi kualifikasi calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C (meliputi kepribadian, kapabilitas, permodalan, agunan, dan situasi ekonomi). Menurut teori Lukman (Dandewijaya, 2005), prinsip 5C merupakan elemen utama yang digunakan dalam menganalisis kelayakan penggalangan dana. dan dimaksudkan untuk mencegah ketidaksesuaian dalam implementasi penggalangan dana. Berikut penjelasan prinsip 5C yang disampaikan Lukman (Dandewijaya, 2005) :

1. *Character* adalah penilaian terhadap sifat atau karakter pribadi calon nasabah, terutama yang berkaitan dengan integritasnya.
2. *Capacity* adalah penilaian kemampuan pelanggan potensial dalam melaksanakan tanggung jawab yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
3. *Capital* adalah penilaian mengenai dana atau modal yang dimiliki calon nasabah Untuk berkontribusi pada proses pembiayaan usaha.
4. *Collateral* merujuk pada aset barang atau jaminan yang harus disediakan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah atau Bank Indonesia, yang harus sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diajukan.
5. *Condition of economy* adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi di sekitar usaha yang dijalankan, serta kemampuan calon nasabah untuk menyediakan bahan baku dan tenaga kerja (Fransisca, 2020).



Kegiatan implementasi prinsip 5C dalam analisis kelayakan kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Mattoangin Peneliti dalam studi ini akan menerapkan teori prinsip 5C yang dikemukakan oleh Lukman

untuk melakukan analisis (Dandewijaya, 2005). Diharapkan, teori ini dapat menjadi dasar bagi peneliti untuk membandingkan penerapan prinsip 5C yang ada dalam literatur dengan praktik yang diterapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Mattoangin. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Mattoangin”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menganalisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Mattoangin?
2. Bagaimana penerapan pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Mattoangin?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan pembatasan kasus yang sudah dijabarkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Mattoangin.
2. Untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Mattoangin.



1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta kontribusi nyata terhadap pengembangan kajian ilmu keuangan, khususnya dalam hal analisis kelayakan kredit perbankan. Penelitian ini memperkaya literatur yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kriteria dan proses analisis kelayakan kredit. Dengan demikian, Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik untuk mempelajari aspek – aspek pengelolaan risiko dalam pembiayaan perbankan, serta peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Investor

Penelitian ini menyajikan informasi yang berguna bagi investor dalam memahami bagaimana PT Bank Negara Indonesia menilai kelayakan kredit. Investor dapat memanfaatkan wawasan ini untuk menilai kualitas portofolio kredit KUR bank dan memutuskan apakah bank tersebut memiliki manajemen risiko yang baik, yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan minat investasi mereka.

2. Bagi Nasabah dalam Pengambilan Kredit

Bagi nasabah, khususnya pelaku UMKM, Penelitian ini menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kriteria dan proses penilaian kelayakan KUR di PT Bank Negara Indonesia. Informasi ini dapat membantu nasabah mempersiapkan dokumen



dan informasi yang diperlukan, serta memahami faktor – faktor yang memengaruhi kemungkinan disetujuinya pengajuan kredit mereka.

3. Bagi Perusahaan (PT Bank Negara Indonesia)

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi PT Bank Negara Indonesia untuk mengevaluasi dan menyempurnakan prosedur dan kebijakan dalam menilai kelayakan pembiayaan KUR. Rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu bank dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan memperkuat kepercayaan nasabah, serta mendukung penyaluran kredit yang lebih produktif.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini menyediakan data empiris dan wawasan teoritis yang dapat dijadikan acuan bagi akademisi yang berminat mempelajari atau melakukan penelitian lebih di bidang pembiayaan perbankan dan manajemen risiko. Skripsi ini juga dapat menjadi landasan untuk penelitian untuk penelitian selanjutnya terkait efektivitas KUR dan dampaknya pada pengembangan UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur kepenulisan yang diterapkan pada penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan rujukan gagasan, bab ini mengulas definisi dari kelayakan, pengertian dan tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis – jenis pembiayaan,



pengertian kredit, pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan mengulas mengenai desain penelitian, variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang diteliti, jenis serta referensi data, prosedur pengumpulan data, serta metode dan teknik yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini memberikan deskripsi tentang subjek penelitian, analisis data yang dilakukan, dan interpretasi hasil pengujian yang diperoleh.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang menyimpulkan temuan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian yang dapat dilakukan di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Kelayakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “layak” berarti dapat diterima, bermartabat dan patut. Kelayakan adalah soal martabat (penerapan, properti), soal kepraktisan. Kelayakan mengacu pada studi mendalam yang dilakukan untuk melihat apakah usaha yang diusulkan akan memberikan lebih banyak manfaat daripada biaya. Oleh karena itu, kelayakan dapat diartikan sebagai penilaian apakah usaha yang dikelola akan memberikan imbalan baik finansial maupun non finansial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Gagasan realistis ini menghasilkan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang mengelola usaha, tetapi juga oleh investor, kreditor, pemerintah, serta masyarakat secara umum (Dandewijaya, 2005). Selanjutnya, Definisi studi kelayakan bisnis menurut para ahli adalah sebagai berikut (Aditama & Rofiudin, 2020):

- 1) Menurut Kasmir dan Jakfar (2003), menyatakan bahwa studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang menganalisis secara mendalam tentang usaha yang akan dijalankan, untuk menentukan apakah bisnis tersebut layak untuk dilaksanakan.
- 2) Menurut Kasmir dan Jakfar (2001), analisis kelayakan usaha adalah proses yang dilaksanakan oleh bisnis guna mengevaluasi kelayakan bisnis yang dijalankan demi mencapai keuntungan yang diinginkan.
- 3) Menurut Nitisetmito dan Burhan (1995), menjelaskan bahwa analisis kelayakan usaha merupakan metode untuk mengeksplorasi kemungkinan apakah suatu gagasan usaha layak untuk dijalankan.



- 4) Menurut Kamsir dan Jakfar (2007: 4), menjelaskan bahwa analisis kelayakan usaha adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek bisnis atau investasi layak dilaksanakan.
- 5) Menurut Drs. H. M. Yacob Ibrahim (1998: 1), menjelaskan bahwa analisis kelayakan usaha merupakan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang apakah suatu gagasan bisnis patut diterima atau ditolak.
- 6) Menurut, Husein Umar (1997), mengemukakan bahwa analisis kelayakan usaha adalah penelitian untuk menentukan apakah suatu proyek besar, biasanya investasi, layak dijalankan.

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang mencakup berbagai faktor, termasuk aspek hukum, sosial ekonomi, budaya, serta pasar dan pemasaran.

2.1.2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau komitmen yang diberikan oleh pihak tertentu, seperti bank atau lembaga keuangan, kepada pihak lain yang membutuhkan dana, dengan tujuan untuk menjalankan usaha atau kegiatan tertentu. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk pinjaman uang atau fasilitas keuangan lainnya yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, beserta bunga atau keuntungan yang disepakati. Pembiayaan atau financing adalah proses pemberian dana oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara individu maupun melalui lembaga. Dengan demikian, pembiayaan merujuk pada dana yang dikeluarkan untuk mendukung rencana investasi yang telah disusun (Kurniadi, 2017). Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bab I Pasal I No. 12, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pemberian uang atau tagihan yang dilakukan



atas dasar kesepakatan antara bank dan nasabah, yang mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana Atau pembayaran itu setelah durasi tertentu dengan kompensasi atau pembagian hasil.

2.1.3.Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum adalah untuk memberikan dukungan keuangan kepada individu, perusahaan, atau entitas lain guna memenuhi kebutuhan finansial nasabah dalam menjalankan atau mengembangkan kegiatan tertentu. Secara umum, peran pembiayaan dalam bidang perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut (Jannah, 2019):

1. Pembiayaan dapat meningkatkan manfaat atau kegunaan dari modal/uang.

Para penabung menyimpan dana mereka di lembaga keuangan untuk menjaga keamanan serta mendapatkan keuntungan atau profit dari bagi hasil. Uang yang disimpan oleh nasabah akan dikelola dan dikembangkan oleh lembaga keuangan dalam jumlah tertentu. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada pengusaha Yang memerlukan investasi untuk memperbesar usaha atau kepada individu yang ingin memulai bisnis, dengan skema bagi hasil. Dengan cara ini, dana dalam lembaga keuangan akan terus berkembang, dan nasabah akan merasa aman serta memperoleh keuntungan.

2. Pembiayaan meningkatkan utility (dana guna) suatu barang

Pembiayaan membantu produsen dalam memproduksi barang jadi, sehingga meningkatkan manfaat dari barang tersebut. Barang yang dipindahkan dari satu daerah ke daerah lainnya akan semakin terasa kegunaannya, yang pada dasarnya juga meningkatkan nilai atau utilitas barang tersebut.



3. Pendanaan mempercepat pergerakan dan aliran dana.

Pembiayaan yang diberikan oleh otoritas keuangan akan memperlancar peredaran uang dalam perekonomian. Dengan kebijakan ini, lembaga keuangan memastikan bahwa uang tidak terhenti pada satu pihak, tetapi berputar dan digunakan oleh pihak lain yang membutuhkan dana, sehingga meningkatkan sirkulasi uang dalam masyarakat.

4. Pendanaan dapat memicu semangat berwirausaha di kalangan masyarakat.

Setiap individu memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Di sinilah peran lembaga keuangan melalui kebijakan pembiayaannya, yaitu memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi mereka demi mencapai keuntungan. Dana pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha membantu mereka memperbesar skala usaha dan meningkatkan produktivitasnya.

5. Pendanaan sebagai sarana untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, pembiayaan berperan dalam mendukung langkah-langkah stabilisasi, seperti mengendalikan inflasi, meningkatkan ekspor, memperbaiki infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

6. Pembiayaan berfungsi sebagai penghubung untuk memperbesar pendapatan nasional

Pengusaha yang menerima pembiayaan akan berusaha memperluas usahanya, yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dapat dikembangkan kembali sehingga terjadi peningkatan berkelanjutan. Dengan bertambahnya pendapatan, kontribusi pajak dari perusahaan juga meningkat. Selain itu, pembiayaan yang



mendukung peningkatan ekspor akan menghasilkan tambahan devisa untuk negara.

7. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Lembaga pembiayaan tidak hanya beroperasi di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara-negara dengan ekonomi kuat sering memberikan bantuan pembiayaan kepada negara berkembang untuk mempererat hubungan bilateral. Bantuan ini biasanya diberikan dengan syarat yang ringan, seperti bunga atau bagi hasil yang rendah serta jangka waktu pengembalian yang panjang.

2.1.4. Jenis – Jenis Pembiayaan

Berdasarkan pengembangan produknya, bank menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu (Kurniadi, 2017):

1. Pembiayaan menurut tujuan :

Berdasarkan tujuannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi :

- a) Pendanaan untuk modal kerja merupakan pendanaan jangka pendek yang disalurkan kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam menjalankan bisnisnya. Umumnya, jangka waktu maksimal untuk pembiayaan ini adalah satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- b) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan investasi, termasuk pengadaan barang konsumtif yang diperlukan oleh nasabah.



2. Berdasarkan durasi waktunya, pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi:
 - a) Pembiayaan jangka waktu pendek merupakan pembiayaan dengan jangka waktu antara 1 bulan hingga 1 tahun. Jenis pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah adalah pembiayaan yang memiliki jangka waktu antara 1 hingga 5 tahun. Biasanya, pembiayaan ini digunakan untuk keperluan investasi.
 - c) Pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun, yang umumnya diperuntukkan untuk kebutuhan dengan skala besar atau proyek jangka panjang.
3. Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi :
 - a) Pembiayaan produktif berupaya memenuhi tuntutan kegiatan produktif secara umum, seperti pengembangan usaha di bidang produksi, perdagangan, dan investasi.
 - b) Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan barang konsumsi, seperti barang kebutuhan pokok sehari-hari atau barang konsumtif.

2.1.5. Alasan Terjadinya Risiko Pembiayaan

Menurut pengalaman dan pendapat penulis, penyebab kredit bermasalah yang banyak terjadi pada bank konvensional juga dapat ditemukan pada bank syariah. Menurut Sutan Rami Sajjadini, permasalahan utang muncul ketika nasabah tidak memenuhi kewajiban perbankannya, bisa karena alasan Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kredit bermasalah dapat berasal dari internal nasabah, faktor internal bank, atau faktor eksternal, keduanya. (Wangsawidjaja, 2012) menguraikan aspek-aspek tersebut sebagai berikut:



1) Faktor-faktor Intern Bank

Ketajaman dan intuisi bisnis analisis kredit yang tidak memadai merupakan salah satu variabel. Elemen-elemen internal bank yang dapat memicu terjadinya kredit tidak baik antara lain:

- Integritas analisis kredit buruk.
- Integritas analisis kredit buruk.
- Anggota komite kredit kurang independen.
- Kreditur “menyerah” pada tekanan dari sumber lain.
- Pengawan bank yang tidak memadai terjadi setelah kredit yang diberikan.
- Pemberian kredit yang terlalu sedikit atau terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan sebenarnya.
- Metode dan prosedur bank dalam mengeluarkan dan melacak kredit tidak memadai.
- Bank tidak memiliki rencana kredit yang efektif.
- Pegawai bank yang melakukan penelitian kredit dan mereka yang menghentikan kredit mempunyai kepentingan pribadi dalam perusahaan atau proyek yang calon nasabahnya mengajukan permohonan kredit.
- Informasi yang tersedia bagi bank mengenai karakter calon debitur belum mencukupi.

2) Faktor-faktor Intern Nasabah

Beberapa faktor internal nasabah yang tidak sejalan dengan tujuan perolehannya antara lain:

- Penyalahgunaan pinjaman oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya merupakan salah satu contoh komponen internal pelanggan yang tidak sejalan dengan tujuan perolehannya.



- Perbedaan pemilik dan pemegang saham.
- Salah satu karyawan penting perusahaan jatuh sakit atau meninggal dunia dan tidak dapat segera digantikan.
- Para ahli yang menjadi fokus utama proyek atau perusahaan berangkat.
- Bisnis tidak efektif yang mengeluarkan biaya overhead berlebihan karena pemborosan.

3) Faktor-faktor Ekstern Bank dan Nasabah

Faktor-faktor ekstern bank dan nasabah dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- Laporan kelayakan konsultan, yang menjadi dasar pertimbangan bank atas kredit, diselesaikan secara tidak akurat..
- Laporan akuntan publik yang menjadi dasar pertimbangan bank terhadap kredit tidak akurat.
- Keadaan komersial dan ekonomi yang diperkirakan ketika kredit diberikan telah berubah.
- Peraturan dan ketentuan yang berlaku pada proyek pelanggan atau sektor ekonomi telah berubah.
- Lanskap politik negara ini telah berubah.
- Negara tujuan ekspor pelanggan telah berubah.
- Pelanggan tidak menyadari perubahan teknologi dalam proyek yang dibiayai atau tidak segera melakukan penyesuaian yang diperlukan.
- Munculnya alternatif yang lebih baik dan terjangkau dilakukan oleh bisnis lain.
- *Force majeure* menyebabkan bencana pada proyek pelanggan Kurang kooperatifnya.



- Kurangnya kolaborasi perusahaan asuransi, karena mereka gagal memberikan penggantian biaya yang dibutuhkan oleh konsumen yang terkena bencana.

2.1.6.Strategi untuk Mengelola Risiko Pembiayaan

Untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang muncul akibat berbagai faktor yang telah disebutkan sebelumnya, penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang bersifat represif (Wangsawidjaja, 2012).

1. Tindakan yang bersifat pencegahan

a. Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah, bank syariah diharuskan untuk menjaga kesehatan dan memperkuat ketahanan dengan mendistribusikan risiko secara seimbang. Ini dilakukan dengan mengelola penyaluran pembiayaan yang mengacu pada prinsip syariah, jaminan, atau fasilitas lainnya, dengan tujuan untuk menghindari konsentrasi pada satu nasabah atau kelompok nasabah tertentu.

b. Kelayakan Penyaluran Dana

Untuk meminimalkan risiko dan menghindari potensi kerugian, bank syariah harus mengimplementasikan manajemen risiko sejak awal. Di samping itu, bank juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang sehat. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 UU Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian.



2. Tindakan yang bersifat represif atau kuratif

Tindakan penanggulangan yang bersifat represif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan yang terganggu atau Non-Performing Financing (NPF).

2.1.7. Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa Latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang adalah gabungan dari kata dalam bahasa Sanskerta ‘cred’ yang berarti “kepercayaan”, dan bahasa Latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Uang, produk, atau jasa diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas kepercayaan yang membutuhkan, dengan syarat dikembalikan atau diganti dalam jangka waktu yang disepakati. Aspek terpenting dalam perbankan adalah distribusi uang, karena uang merupakan pengganti barang dan jasa yang populer. Kredit biasa disebut dengan “pinjaman” atau “utang”. Pengertian “kredit” menurut UU 10/1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Hariyani, 2010). Berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah pengaturan dana atau kewajiban pembayaran yang setara, yang dilakukan melalui kontrak atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya dalam waktu tertentu saatnya mencari keuntungan (Lina Situngkir, 2022).



2.1.8. Pemberian Kredit Berdasarkan Penilaian Prinsip 5C

Menurut (Kasmir, 2014), (Mutiara, 2023) sebelum mengeluarkan kredit, bank harus melakukan verifikasi bahwa kredit tersebut dapat dilunasi secara memadai. Prinsip-prinsip pemberian kredit yang berdasarkan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Adalah orang yang diberi penghargaan harus mempunyai watak yang dapat diandalkan. Hal ini tercermin dalam pekerjaan konsumen, riwayat pribadi, gaya hidup, status keluarga, serta perilaku dan kepribadian yang mereka tunjukkan dalam lingkungan sosialnya.

2. *Capacity*

Adalah merujuk pada Kemampuan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang diberikan. Ini mencakup sejauh mana nasabah dapat mengelola usahanya dengan baik secara efektif untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

3. *Capital*

merupakan besarnya modal yang dimiliki oleh calon debitur atau. seberapa besar modal yang telah ditanamkan oleh debitur dalam usahanya. Semakin besar modal yang dimiliki, semakin baik posisi finansial calon nasabah dalam menjalankan usahanya.

4. *Collateral*

Calon pembeli memberikan jaminan untuk mengamankan kredit yang diberikan. Agunan tersebut harus lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan, dan harus diselidiki keabsahannya secara menyeluruh jika timbul permasalahan.



5. *Condition of economy*

Menyangkut kondisi ekonomi saat ini dan prediksi untuk masa depan. Dalam analisis ini, penting untuk menilai apakah kondisi ekonomi yang ada memiliki dampak terhadap usaha calon nasabah, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang..

2.1.9. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan yang ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi, yang didukung dengan fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Meskipun program ini dicanangkan oleh pemerintah, sumber dana untuk KUR sepenuhnya berasal dari bank. KUR dirancang sebagai skema pembiayaan yang khusus untuk UMKM dan koperasi dapat bertahan dalam sektor usaha manufaktur, meskipun mereka menghadapi tantangan dalam memenuhi standar perbankan. Kur adalah program pinjaman/pembiayaan yang nilainya kurang dari Rp. 500.000,- 80% dari plafon kredit sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, serta 70% plafon kredit sektor lain-lain dengan jaminan maksimal (Lina Situngkir, 2022).



2.2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul/Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Pendekatan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hauriatul Jannah(2019) Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan dan strategi yang diterapkan dalam menangani risiko pembiayaan KUR Mikro iB pada PT.BRISyariah	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara terstruktur. 5C merupakan metode dalam menilai kelayakan pembiayaan terdiri dari character, capacity, collateral, capital dan condition of economy.	Hasil penelitian menunjukkan PT.BRISyariah melakukan analisis kelayakan pada pembiayaan sesuai dengan teori dan prosedur yang ada. Strategi penanganan tantangan pendanaan dilaksanakan melalui prosedur diskusi yang mempertimbangkan tingkat kolektibilitas pembiayaan (Jannah, 2019).



No	Peneliti/Judul/Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Pendekatan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Anya Kurniadi Putri(2017) Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City	Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui cara PT. Bank BRI dalam menganalisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB BRISyariah Kantor Cabang BSD City yang diajukan nasabah dan untuk mengetahui alur prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB BRISyariah Kantor Cabang BSD City.	Penyusunan Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, menurut Sugiyono metode ini memandu penulis untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara luas dan mendalam. 5 aspek yaitu karakter, modal, kapasitas usaha, kondisi ekonomi, dan jaminan/agunan.	Hasil Penelitian ini adalah prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB BRISyariah Kantor Cabang BSD City dilakukan dalam beberapa tahap pembiayaan, yaitu tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pengambilan keputusan keuangan, pencairan/kontrak keuangan, dan pemantauan atau pemantauan pembiayaan (Kurniadi, 2017).



No	Peneliti/Judul/Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Pendekatan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Elsa Yan Fransisca 2020 Pelaksanaan Prinsip 5C Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar	Untuk mengetahui mengapa pada praktiknya pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Blitar hanya menggunakan 3C (character, capacity, dan collateral) saja, dan bagaimana implikasi pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan terhadap pembiayaan KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis penelitian field research, sumber data yang didapatkan yaitu sumber data primer diperoleh dari informan Wawancara dilakukan di BRI Syariah KCP Blitar untuk menilai pengambilan keputusan pendanaan, pencairan/kontrak dan langkah mikro petugas akuntansi. Metode pengumpulan data mencakup observasi, tanya jawab, dokumentasi dan tahap monitoring atau keuangan.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan dari para ahli, namun belum semua diterapkan secara teliti (Fransisca, 2020).



No	Peneliti/Judul/Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Pendekatan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Anggita Renata Sari.2022 Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Outlet Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kepahiang	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pembiayaan produk KUR pada Outlet BSI Kepahiang dan bagaimana analisis kelayakan pemberian pembiayaan produk KUR pada Outlet BSI Kepahiang.	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.	Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa prosedur pemberian pembiayaan produk KUR pada Outlet BSI Kepahiang terdapat 6 tahap yaitu: tahap pengajuan permohonan, tahap pemeriksaan persyaratan, tahap Analisis usaha dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pemberian keputusan yang dilakukan oleh Micro Staff, Kepala



				Unit, dan Kepala Pimpinan Cabang Bengkulu, dilanjutkan dengan tahap akad perjanjian dan penandatanganan, serta tahap pencairan. Proses ini digunakan dalam menilai kelayakan pemberian pembiayaan untuk produk KUR (Sari, 2022).
5	Dicky Wahyudi 2021, Analisis Kelayakan Pemberian Kredit KUR Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Standar Prosedur yang digunakan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank BRI Cabang Kabupaten Pinrang.	Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Lapangan (Field Work Research), Penelitian Kepustakaan (Library Research), Metode Observasi.	Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Analisis Kelayakan



			Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif	merupakan salah satu faktor yang dapat menekan kredit bermasalah pada usaha yang bergerak di bidang perbankan (Wahyudi, 2021).
6	Fitri 2018 Analisis Peningkatan Pendapatan UKM Pengguna Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BNI KCP Mattoangin Pangkep	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peningkatan pendapatan UKM pengguna dana KUR dan menguji kelayakan pada Bank BNI KCP Mattoangin Pangkep	Penelitian ini telah dilaksanakan di PT. BNI KCP Mattoangin Pangkep dengan pendekatan kuantitatif. Instrument yang digunakan berupa wawancara kepada 40 UKM. Analisis data teknik statistic dengan menggunakan tabulasi dan persentase.	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa peningkatan pendapatan UKM pengguna dana KUR meningkat sebesar Rp. 381.012.000, per tahun atau sebesar 50,60%, dan Kredit Usaha Rakyat yang di berikan oleh PT BNI KCP Mattoangin Pangkep secara keseluruhan layak



				untuk di teruskan (SE & Anggraeni, 2019).
7	Mira Hastin 2023 Analisis Proses Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Negara Indonesia (Persero) TBK KCU Sungai Penuh Tahun 2022	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prosedur pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BNI Cabang Sungai Penuh, syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BNI Cabang Sungai Penuh, BNI menyikapi berkas permohonan nasabah yang lengkap tetapi belum dilakukan perjanjian kredit.	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang bersumber dari observasi dan wawancara. Metode pendekatan yang digunakan yaitu <i>fenomenology</i> . Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (persero), TBK KCU. Sungai Penuh sudah menjalani proses pengajuan kredit sesuai standar operasional prosedur dan telah terlaksana dengan efektif dan efisien (Hastin, 2023).



			kesimpulan atau verifikasi.	
8	Citra Dewi, 2022, Analisis Kelayakan dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank Rakyat Indonesi Unit Salobulo Kota Palopo'	Penelitian ini bertujuan untuk prosedur kelayakan nasabah dalam pemberian kredit usaha rakyat, serta bentuk analisa kelayakan pemberian KUR Mikro pada calon nasabah BRI Unit Salobulo dan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah memberikan KUR Mikro kepada nasabah.	Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan field research. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BRI Unit Salobulo memiliki prosedur yang mudah dalam prosesnya dan memiliki persyaratan yang sederhana terhadap calon nasabah yang ingin mengajukan KUR Mikro (Dewi, 2022).
9	Shanty Dwiani, 2018 Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan KUR Mikro iB oleh BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta. Dan juga untuk mengetahui analisis	Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dekstriptif	Adapun hasil penelitian yaitu, dalam prosedur pembiayaan BRI Syariah KCI Abdul Muis sangat cepat sesuai SLA hanya 1-3 hari dan persyaratannya



		<p>kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis</p>		<p>pun mudah untuk dipenuhi masyarakat. Pada analisis kelayakan pembiyaannya menggunakan 4C dan 1S apalagi tanpa garansi, karena KUR Mikro tidak harus memberikan garansi. Teknik analisis pendanaan masih efektif dibuktikan dengan tingkat NPF yang wajar. Seria KCI Abdul Moussa BRI menekankan pendekatan hubungan dengan konsumen (Dwiani, 2018).</p>
--	--	---	--	--



No	Peneliti/Judul/Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Pendekatan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10	Fenly Eclisia Poendey 2019 Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah Kota Makassar)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara Bank BRI Syariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan untuk mengetahui alur prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Syariah KC Makassar	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan data primer dan data sekunder.	Hasil penelitian ini yaitu prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Syariah KC Makassar dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian Keputusan pemberian pembiayaan, tahap penyaluran pembiayaan, dan tahap pengawasan pembiayaan. (Eclisia, 2019).



2.3. Kerangka Berfikir

PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Mattoangin memiliki fungsi utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana, serta menyediakan berbagai layanan lainnya. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam proses penyaluran pembiayaan, PT. Bank Negara Indonesia melakukan evaluasi kelayakan terhadap nasabah dan usaha yang diajukan. Analisis ini berfungsi untuk menilai apakah nasabah memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan, serta mendukung bank dalam membuat keputusan yang akurat. Dengan prosedur dan analisis yang baik, bank dapat meminimalkan risiko pembiayaan dan meningkatkan profitabilitasnya. Selain itu, PT. Bank Negara Indonesia juga menerapkan berbagai strategi dalam menangani risiko pembiayaan yang mungkin terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

